

Wacana, Pengetahuan, dan Kuasa dalam Debat Pilkada 2024 di Pesisir Selatan Berdasarkan Perspektif Foucault

Husnatul Aini¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam debat publik Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. Berangkat dari realitas untuk menganalisis isi debat terhadap wacana yang dibangun paslon, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi, dan teori yang digunakan adalah teori pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault. Data penelitian diperoleh dari rekaman debat publik putaran pertama yang ditayangkan oleh TVRI Sumatera Barat, serta diperkuat melalui wawancara dengan informan terkait yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paslon 1 membangun wacana politik yang menekankan pada keberlanjutan program yang telah ia lakukan sebelumnya semasa menjadi bupati, karena ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan dulunya telah berhasil dan ingin di lanjutkan pada masa sekarang ini. Seperti pendidikan dan kesehatan gratis, serta memperkuat peran musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat. Sementara itu, Paslon 2 membangun wacana politiknya dengan mengatakan bahwa kondisi saat ini tidak lebih baik dari masa lalu, disaat ia menjadi bupati, ia mengatakan bahwa semasa ia menjadi bupati pembangunan maju dan berkembang dan itu tidak ia rasakan pada masa sekarang ini. Pendekatan ini membuat mereka terlihat sebagai pemimpin yang berpikir maju, mampu memberi solusi nyata, dan berfokus pada pembaruan dengan dasar data, aturan pemerintah, serta dukungan pemerintah pusat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana para calon menggunakan bahasa dan cara berbicara untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat melalui wacana yang mereka bangun.

Kata Kunci: Analisis isi; Debat publik; Pilkada.

Abstract

This study aims to analyze discourse, knowledge, and power in the 2024 Pilkada public debate in Pesisir Selatan Regency. Departing from reality to analyze the content of the debate against the discourse constructed by the candidate pairs, this study uses a qualitative method with content analysis, and the theory used is Michel Foucault's theory of knowledge and power. The research data was obtained from recordings of the first round of public debates broadcast by TVRI West Sumatra, and strengthened through interviews with relevant informants who met the required criteria. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model consisting of data collection, data reduction and drawing conclusions. The results show that Candidate Pair 1 built a political discourse that emphasized the continuity of programs that had been implemented previously during his term as regent, because he considered that what he did in the past had been successful and wanted to continue in the present. Such as free education and health, and strengthening the role of musrenbang as a forum for community participation. Meanwhile, Candidate Pair 2 built his political discourse by stating that the current conditions were no better than the past, when he served as regent. He stated that during his tenure, development had progressed and flourished, a trend he hadn't experienced before. This approach made them appear as forward-thinking leaders, capable of providing concrete solutions, and focused on data-driven reforms, government regulations, and central government support. The implications of this research suggest that the results can help understand how candidates use language and speaking style to build trust and persuade the public through their discourse.

Keywords: Content analysis; Public debate; Regional Elections.

How to Cite: Aini, H. & Putra, E. V. (2026). Wacana, Pengetahuan, dan Kuasa dalam Debat Pilkada 2024 di Pesisir Selatan Berdasarkan Perspektif Foucault. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(1), 99-110.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu elemen penting dalam mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Wujudnya adalah rakyat diberi hak untuk menentukan kepala daerah. Siapa yang akan terpilih, sangat tergantung pada pilihan mayoritas rakyat (Ramadhan & Prolog, 2006). Perwujudan kedaulatan rakyat juga diimplementasikan dengan menampilkan pasangan calon kepala daerah. Mereka dapat dicalonkan oleh partai politik atau melalui calon perseorangan (Warjiyati, 2014). Dalam konteks tersebut, Pilkada menjadi arena perebutan kekuasaan yang sah. Di mana rakyat memiliki otoritas penuh untuk menentukan pilihan secara langsung, sedangkan paslon menjadi kandidatnya (Purwono, 2008). Pilkada serentak 2024 menjadi kontestasi politik terbesar di Indonesia KPU RI mencatat sebanyak 545 daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melakukan Pilkada. 37 Pilkada, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 415 Pilkada memilih bupati dan wakil bupati dan 93 Pilkada untuk memilih walikota dan wakil walikota. Tercatat sebanyak 1553 pasangan calon berkompetisi pada pesta demokrasi yang waktu pencoblosan dilakukan pada tanggal 7 November 2024 (KPU RI, 2024).

Pada ranah lokal Sumatera Barat, Pilkada dilakukan di 20 daerah, dengan rincian satu di tingkat provinsi, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 12 di tingkat kabupaten, untuk memilih bupati dan wakil bupati, dan 7 di tingkat kota, untuk memilih walikota dan wakil walikota. Untuk pasangan calon, tercatat sebanyak 56 paslon (KPU RI, 2024). Salah satu Pilkada yang menarik perhatian publik adalah Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang saling berkompetisi di daerah pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. dan Nasta Oktavian, S.H., M. Kn sebagai paslon 1, sementara itu H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H sebagai paslon 2 (KPU Kabupaten Pesisir Selatan, 2024). Salah satu tahapan dari penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 adalah kampanye. Pada Pilkada 2024, pelaksanaan kampanye mulai tanggal 27 September 2024 sampai tanggal 23 November 2024. Berdasarkan pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 terdapat 7 metode kampanye, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye (Abdurohman, 2024). Debat yang disiarkan secara luas melalui berbagai media massa mampu menjangkau tidak hanya pemilih yang aktif mengikuti isu-isu politik, tetapi juga pemilih pemula serta mereka yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses pemilihan (Daulay et al, 2021). Debat publik disiarkan melalui berbagai jenis media massa konvensional, televisi dan radio, yang telah dibuat oleh KPU. Mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, media juga menyiarkan *live streaming* melalui akun media sosial seperti *YouTube* (Kamindang, Tabran, Ambotuo, & Hamid, 2023). Pada batasan ini menarik untuk melihat bagaimana wacana kekuasaan dibangun dalam debat publik Pilkada 2024 di Pesisir Selatan, untuk itu menarik untuk melihat bagaimana kekuasaan diproduksi melalui bahasa dan pengetahuan (Foucault, 2017).

Sebagai kasus, penelitian ini menganalisis debat publik pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana terdapat dua pasangan calon, Rusma Yul Anwar dan Ranasta Oktavian sebagai paslon 1, Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim sebagai paslon 2. Kontestasi antara Rusma Yul Anwar dan Hendrajoni telah terlihat sejak periode 2015-2020, saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Meski berpasangan, keduanya diketahui publik tidak sejalan, kontestasi yang panjang antara kedua tokoh menjadi alasan kenapa Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan studi kasus. Penyelenggaraan debat publik pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan sebanyak dua putaran. Putaran pertama pada tanggal 7 November 2024 dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Putaran kedua pada tanggal 14 November 2024 dengan tema tata kelola dan ketahanan sosial, budaya dan kearifan lokal. Pelaksanaan debat publik ini di siarkan secara langsung dari studio 1 TVRI Sumatera Barat kemudian dipublikasikan di *channel youtube* TVRI Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis isi debat publik putaran pertama, dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Tema debat putaran pertama ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan erat dengan isu-isu mendasar yang menjadi indikator utama

keberhasilan pemerintahan, seperti pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut menjelaskan terkait dengan penelitian ini. Penelitian Iskandar (2020) mengkaji wacana politik dalam debat publik calon presiden dan calon wakil presiden, menunjukkan bagaimana kandidat membangun narasi dan argumentasi untuk memperkuat citra politiknya. Penelitian Jamaluddin, et al (2024) turut menjelaskan bagaimana pelaksanaan debat publik dapat memperkuat posisi calon bupati dan wakil bupati dalam kompetisi politik lokal. Sementara itu, penelitian Aefra et al (2025) memusatkan perhatian pada pola komunikasi tiap pasangan calon dalam debat ke-5 calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, dengan temuan bahwa pola komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan publik yaitu penelitian Rawis (2019) menunjukkan bahwa metode kampanye debat memiliki efektivitas dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap program kandidat. Anwar, (2019) menjelaskan efektivitas kampanye politik melalui pendekatan *public relations*, termasuk peran debat publik di dalamnya. Penelitian Kamindang et al., (2023) membahas pengaruh debat politik terhadap preferensi pemilih pada Pilkada Kota Palu, sedangkan penelitian Kurniawan, (2024) menekankan pengaruh strategi saling serang dalam debat calon presiden terhadap elektabilitas. Adapun penelitian Rahayu et al. (2024) membuktikan bahwa debat publik turut memengaruhi pemilih mengambang pada Pemilu 2024. Kemudian penelitian yang berfokus pada komunikasi publik dan jaringan komunikasi dalam penyelenggaraan debat yaitu, penelitian Juditha & Darmawan, (2024) mengungkap pola jaringan komunikasi warganet dalam menanggapi debat publik calon presiden dan wakil presiden di media sosial.

Dari beberapa penelitian relevan, terdapat kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan, yaitu sama-sama menjadikan debat publik sebagai bagian penting dari komunikasi politik dan ruang bagi para calon untuk membangun citra diri mereka, menyampaikan gagasan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Beberapa penelitian juga membahas bagaimana strategi komunikasi dan cara paslon berbicara dapat membentuk persepsi publik. Namun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak ada yang menggunakan teori Michel Foucault untuk melihat bagaimana wacana, pengetahuan, dan kuasa bekerja di dalam debat politik. Sebagian besar penelitian terdahulu masih fokus pada seberapa efektif debat mempengaruhi pemilih, bagaimana strategi komunikasi para calon, atau bagaimana respons masyarakat, tetapi belum melihat bagaimana wacana dalam debat itu dibentuk dan digunakan sebagai bentuk kekuasaan simbolik. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya mengkaji debat di tingkat nasional atau daerah lain. Penelitian ini secara khusus mengkaji debat publik Pilkada Pesisir Selatan 2024 dengan menggunakan teori Michel Foucault. Melalui teori ini, penelitian berusaha memahami bagaimana para calon membangun wacana, menggunakan pengetahuan, dan menunjukkan kuasa melalui bahasa selama debat. Penelitian ini bukan hanya melihat apa yang disampaikan para calon, tetapi mencoba menelusuri bagaimana bahasa dan argumen yang mereka pakai dapat membentuk cara masyarakat melihat mereka dan bagaimana debat menjadi bagian dari perebutan legitimasi politik di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Michel Foucault untuk menganalisis debat publik sebagai arena pembentukan wacana, pengetahuan, dan kuasa. Belum ada penelitian sebelumnya yang membahas debat Pilkada Pesisir Selatan melalui perspektif ini, sehingga penelitian ini menawarkan cara pandang baru terhadap bagaimana bahasa dan argumen digunakan para calon sebagai strategi politik untuk memperkuat legitimasi dan mempengaruhi pemahaman publik. Penelitian ini secara spesifik mengkaji debat publik Pilkada Pesisir Selatan 2024 sebagai ruang bagi pasangan calon membentuk wacana, menyampaikan argumen, dan menunjukkan kuasa melalui bahasa. Dengan menggunakan teori Michel Foucault sebagai pendekatan utama, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masing-masing calon membangun wacana, bagaimana pengetahuan diproduksi dan digunakan untuk mendukung posisi politik mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan strategi analisis isi (Schreier, 2024). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir selatan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam debat publik. Data dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Informan yang dipilih secara *purposive*, dengan kriteria yaitu, komisioner KPU Pesisir Selatan serta tim panelis debat putaran pertama, dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan debat, sehingga dianggap sebagai pihak paling kompeten dalam memberikan informasi mendalam tentang jalannya debat (Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi terhadap jalannya debat, wawancara dengan komisioner dan panelis, serta studi dokumen terhadap materi yang berkaitan dengan debat publik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (1992) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses ini, peneliti mengorganisir data debat, menemukan pola wacana, menginterpretasikan relasi pengetahuan dan kekuasaan, serta menyusun kesimpulan yang sesuai dengan perspektif teori Foucault.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mendeskripsikan temuan yang diperoleh melalui studi dokumen, dan wawancara terkait dengan wacana, pengetahuan, serta relasi kuasa dalam debat publik di Kabupaten Pesisir Selatan. Analisis penelitian difokuskan pada identifikasi wacana dominan yang muncul serta bagaimana pengetahuan digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam dinamika debat publik, dengan menggunakan perspektif teori wacana, pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault sebagai kerangka analisis.

Wacana dominan Paslon 1 dan Paslon 2

Pada segmen 1 wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 adalah melanjutkan program sebelumnya dengan fokus utama pada pendidikan dan kesehatan gratis sebagai cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutamakan program ini, paslon 1 ingin menegaskan bahwa mereka memahami persoalan nyata masyarakat, yaitu biaya pendidikan dan kesehatan yang sering menjadi beban utama keluarga. Penekanan ini juga dimaksudkan untuk meyakinkan publik bahwa keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan gratis merupakan langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan, karena langsung menyentuh aspek kehidupan sehari-hari, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“... Melanjutkan program kerja sebelumnya, yaitu gratis SD dan SMP, memberikan seragam gratis untuk SD dan SMP, memberikan pelayanan berobat gratis dan melanjutkan kartu sehat pasisie rancak menugaskan pegawai honorer menjadi P3K, persiapan pemekaran ranah indojadi, mempersiapkan mitigasi bencana lewat tangguh bencana...” (Kutipan debat 34:24-34:34).

Wacana dominan paslon 1 menekankan keberlanjutan program sosial di bidang pendidikan dan kesehatan gratis sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menegaskan bahwa program tersebut telah berhasil pada masa sebelumnya, paslon 1 membangun citra sebagai pemimpin yang peduli rakyat sekaligus memperkuat legitimasi politik melalui janji untuk melanjutkan program yang telah ia jalankan. Sementara itu, paslon 2 membangun wacana dominan tentang peningkatan kesejahteraan melalui program pro-rakyat berbasis nagari yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, ketahanan pangan, serta bantuan sosial-ekonomi. Paslon 2 ingin menunjukkan bahwa mereka memahami persoalan nyata masyarakat, terutama terkait biaya sekolah, biaya berobat, dan keterbatasan modal usaha. Penekanan tersebut juga dimaksudkan untuk meyakinkan publik bahwa pemerataan pembangunan sampai ke nagari merupakan strategi penting untuk menciptakan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“...Paslon 2 juga menjelaskan program kerjanya dengan jelas, dimana ada 5 program unggulan pro rakyat yaitu Program nagari kanyang untuk ketahanan pangan, nagari pandai melalui pendidikan gratis dan beasiswa, nagari sehat dengan fasilitas berobat gratis, nagari sejahtera dengan bantuan rumah tidak layak, santunan kematian dan modal usaha bagi pelaku UKM (usaha kecil masyarakat) yang akan dijalankan sebagai bentuk pemerataan pembangunan diberbagai bidang di semua nagari...” (Kutipan debat 37:33-38:27).

Berdasarkan kutipan debat diatas, wacana dominan yang dibangun paslon 2 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pro-rakyat berbasis nagari yang menyentuh berbagai kebutuhan dasar dan pemerataan pembangunan. Paslon 1 ingin menunjukkan bahwa program yang ditawarkan tidak hanya fokus pada satu masalah, tetapi mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, dan bantuan sosial, sehingga dapat memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, paslon 2 berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat sekaligus mencari legitimasi politik melalui janji program nyata. Sementara itu, paslon 1 menekankan wacana keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan gratis sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terus menekankan bahwa program sebelumnya telah berhasil dan perlu dilanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paslon 1 berfokus pada kelanjutan kebijakan yang sudah ada, sedangkan paslon 2 menonjolkan pemerataan pembangunan sampai ke nagari sebagai bentuk perubahan yang mereka tawarkan. Pada segmen 2 wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 yaitu terkait bagaimana strategi paslon 2 untuk mewujudkan Pesisir Selatan swasembada pangan, dengan cara penguatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Paslon 2 menekankan bahwa perlambatan ekonomi di Pesisir Selatan terjadi karena sektor-sektor tersebut belum tergarap secara maksimal, sehingga kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Penekanan ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara tepat dapat menjadi solusi utama

dalam meningkatkan ekonomi daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“... Kami dari paslon 02, menawarkan kepada masyarakat kita agar kita mulai bergerak untuk menggali potensi alam Kabupaten Pesisir Selatan yang kaya raya ini dalam hal untuk pertanian, perkebunan, perikanan mengarah kepada agroindustri dan agroekonomi. Maka kami tawarkan jalan usaha tani harus kita persiapkan dengan matang, rehabilitasi pembangunan irigasi kita, bantuan bibit kita dipastikan dan juga masalah pupuk harus ketersediaannya dijamin dan mudah didapatkan oleh masyarakat kita....” (Kutipan debat 44:36-45:08).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa inti wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui agroindustri, dan ditunjang oleh infrastruktur dan sarana yang memadai. Paslon 2 ingin dilihat sebagai calon pemimpin yang mampu memberi solusi nyata untuk memperbaiki ekonomi daerah. Mereka menekankan langkah-langkah praktis dengan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap masalah perlambatan ekonomi, melainkan juga mempunyai visi jangka panjang untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan daerah. Sementara itu wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 terkait dengan strategi paslon 1 mempersiapkan SDM yang berdaya saing melalui perbaikan kualitas pendidikan, adalah dengan cara menghapus hambatan biaya sekolah yang selama ini menjadi beban masyarakat. Menurut Paslon 1, rendahnya rata-rata lama sekolah di Pesisir Selatan merupakan persoalan serius yang perlu segera ditangani. Untuk itu, mereka menawarkan solusi dengan menanggung biaya pendidikan melalui pemanfaatan dana APBD. Tujuannya agar anak-anak tidak berhenti sekolah dan setiap keluarga dapat terus menyekolahkan anaknya, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“... Beban-beban berat yang selama ini menjadi halangan bagi masyarakat kita untuk mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah, ke depannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah. Kemungkinan ini bisa kami lakukan dengan memanfaatkan dana APBD yang tersedia karena kami tahu bahwa dana APBD itu sendiri adalah dana masyarakat Pesisir Selatan, dan kami juga tahu bahwa pendidikan itu adalah urusan wajib pemerintah, dan untuk itu kami punya kewajiban untuk menuntaskan hal yang seperti itu....” (Kutipan debat 48:04-48:37).

Wacana dominan paslon 1 pada segmen ini adalah pemerataan akses pendidikan melalui penanggung biaya sekolah oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBD. Dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, paslon 1 berupaya membangun citra sebagai pemimpin yang peduli pada masa depan generasi muda dan menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Sementara itu, paslon 2 membangun wacana penguatan ekonomi daerah melalui swasembada pangan dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan berbasis agroindustri sebagai solusi nyata untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paslon 1 fokus pada pendidikan sebagai dasar kemajuan, sedangkan paslon 2 menekankan pengembangan ekonomi melalui potensi lokal. Pada segmen 3 wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 terkait dengan strategi yang digunakan dalam memastikan proses dan hasil musrenbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adalah dengan pelaksanaan musrenbang secara berjenjang, mulai dari nagari, kecamatan sampai kabupaten. Tujuannya agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan, bisa ditindaklanjuti dan tidak hanya menjadi omong kosong dan wacana semata seperti yang tampak dalam kutipan berikut.

“... Karena apabila suara-suara yang muncul dalam musrenbang itu tidak bisa kita tanggapi dan tidak bisa kita laksanakan ini akan melahirkan antipati bagi masyarakat kita untuk bisa berperan serta menyumbangkan pemikirannya dalam pembangunan nagari kedepan Selain dari itu, kita juga menanamkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara mengajak dan mengedukasi bahwa pentingnya peranan mereka, suara mereka, keinginan-keinginan mereka, akan menentukan bagaimana nagari atau desa yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan itu bisa kita wujudkan sesuai visi, dan misi kita bersama sekaligus juga mensejahterakan masyarakat Pesisir Selatan....” (Kutipan debat 55:41-56:02).

Berdasarkan pernyataan diatas inti wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, mereka memposisikan diri sebagai calon pemimpin yang konsisten mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penekanan pada musrenbang sebagai instrumen partisipatif memperlihatkan bahwa Paslon 1 ingin membangun legitimasi politik melalui komitmen untuk menjalankan aspirasi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, mereka tidak hanya

menampilkan diri sebagai pemimpin yang peduli, tetapi juga sebagai pihak yang siap mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 sama dengan apa yang disampaikan oleh paslon 1 bahwa pelaksanaan musrenbang itu memang harus dilaksanakan secara berjenjang tetapi mereka tidak hanya sampai pada tingkat kabupaten melainkan sampai tingkat provinsi dan pusat. Penekanan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat akan dihargai, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, dan kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, Renstra, hingga APBD, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“... Maka daripada itu skala prioritas ini akan kita naikkan berjenjang itu sampai di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan musrenbang ini sampai ke tingkat nasional. Sehingga demikian kita harus paham mana yang menjadi sebuah kewenangan tingkat pusat maupun tingkat Provinsi termasuk tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan musrenbang apa yang kita usulkan maka kepala daerah sangat penting dalam hal ini mengikuti musrenbang dengan OPD-OPD yang ada membahas hal ini, karena kelanjutannya adalah menjadikan sebuah renstra daerah untuk menjadikan dalam satu kesatuan nantinya menuju kepada APBD yang termuat di dalam satu kesatuan visi dan misi kepala daerah itu...” (Kutipan debat 58:14-58:52).

Berdasarkan pernyataan diatas inti wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 adalah pentingnya pelaksanaan musrenbang secara berjenjang, disini mereka memposisikan diri sebagai calon pemimpin yang benar-benar paham aturan dan langkah resmi dalam membangun daerah. Mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa setiap aspirasi yang muncul akan dijalankan sesuai prosedur, mulai dari musrenbang kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu terkait dengan strategi yang digunakan oleh paslon 2 untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Disini, wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 adalah dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pembangunan infrastruktur, khususnya jalan usaha tani dan jaringan irigasi. Masalah irigasi dianggap penting karena menjadi kendala utama petani di Pesisir Selatan. Selain itu, mereka juga menawarkan program pendukung berupa bantuan bibit, pupuk, modal, tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan, serta pemberdayaan penyuluh dan nelayan budidaya perikanan darat. Program ini menunjukkan bahwa Paslon 2 tidak hanya memperhatikan produksi pertanian, tetapi juga tahap pascapanen dengan menyiapkan pengembangan agroindustri untuk komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan ikan, seperti yang tampak pada kutipan berikut.

“... Membangun jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan bibit dan pupuk, penyediaan tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan, akses modal, pemberdayaan nelayan budidaya perikanan darat, peningkatan kesejahteraan penyuluh, serta mengembangkan agroindustri untuk komoditas unggulan gambir, sawit, dan ikan Kita juga membuat didalam visi dan misi kita untuk pangan ini maka kita infrastruktur pertanian soal irigasi seluruhnya sampai irigasi tersier masyarakat yang harus sampai pada sawah masyarakat harus kita persiapkan.... (Kutipan debat 1:03:35-1:04:11).

Berdasarkan pernyataan diatas inti wacana dominan yang dibangun oleh paslon 2 adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan agroindustri untuk komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan ikan. Pernyataan ini menekankan bahwa mereka benar-benar memperhatikan permasalahan nyata yang dihadapi petani dan nelayan di Pesisir Selatan. dengan demikian paslon 2 berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan petani dan nelayan melalui pendekatan yang menyeluruh. Sementara itu wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 adalah lebih menekankan pada pentingnya memahami kewenangan pemerintah dalam pembangunan, terutama irigasi. Paslon 1 menegaskan bahwa tidak semua irigasi di Pesisir Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, melainkan sebagian merupakan kewenangan provinsi maupun pemerintah pusat, tujuannya adalah supaya program bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan APBD daerah. Seperti yang tampak dalam kutipan berikut.

“... Setiap irigasi-irigasi yang ada di Pesisir Selatan tidak semuanya menjadi kewenangan pemerintah daerah Pesisir Selatan. Nah untuk itu batas-batasnya kita harus tahu mana yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah Pesisir Selatan, mana yang harus kita minta bantuan ke Provinsi Sumatera Barat, mana yang harus kita mintakan bantuan kepada kementerian PUPR yang ada di Jakarta.” (Kutipan debat 1:06:07- 1:06:30).

Berdasarkan pernyataan diatas, inti wacana dominan yang dibangun oleh paslon 1 adalah pentingnya memahami batas kewenangan dalam pembangunan irigasi, sehingga pemerintah kabupaten tahu mana yang menjadi tanggung jawab daerah, provinsi ataupun pusat. Disini, paslon 1 berusaha memposisikan diri sebagai kandidat yang memahami prosedur resmi dalam pembangunan dan siap memanfaatkan jaringan politik yang dimilikinya untuk memberikan solusi nyata. Pada segmen 3, wacana dominan paslon 1 menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam musrenbang serta memahami batas kewenangan pemerintah agar pembangunan, terutama irigasi, dapat tepat sasaran. Mereka ingin menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat dihargai dan setiap program harus sesuai aturan serta kemampuan daerah. Sementara itu, paslon 2 membangun wacana peningkatan kesejahteraan melalui musrenbang berjenjang hingga pusat, serta penguatan pertanian dan perikanan melalui infrastruktur, sarana produksi, dan pengembangan agroindustri. Mereka menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus diteruskan ke tingkat lebih tinggi dan disertai solusi nyata bagi petani dan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paslon 1 fokus pada ketepatan kewenangan dan aspirasi lokal, sedangkan paslon 2 menonjolkan pendekatan berjenjang dan penguatan sektor ekonomi rakyat.

Wacana dominan paslon 1 dari segmen 1 sampai segmen 3 menekankan keberlanjutan program sosial yang telah dijalankan sebelumnya, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, pemerataan akses pendidikan melalui APBD, pelibatan masyarakat dalam musrenbang, hingga peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan digital dan pengembangan wisata baru. Sementara itu, paslon 2 membangun wacana dominan berupa program pro-rakyat berbasis nagari, penguatan ekonomi melalui swasembada pangan dan agroindustri, musrenbang berjenjang dengan solusi konkret bagi petani dan nelayan, serta pengembangan agroindustri dan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, paslon 1 berupaya melegitimasi keberhasilan program masa lalu dan menegaskan komitmen untuk melanjutkannya, sedangkan paslon 2 mendelegitimasi kondisi saat ini dengan menekankan bahwa pembangunan pada masa mereka sebelumnya lebih maju. Pertarungan wacana di antara keduanya memperlihatkan bahwa paslon 1 menonjolkan keberlanjutan, sedangkan paslon 2 menekankan perubahan dan pemulihan kondisi daerah seperti masa lalu yang dianggap lebih baik.

Kuasa dan Pengetahuan Paslon 1 dan Paslon 2

Pada segmen 1 kuasa dan pengetahuan belum terlihat jelas karena pada segmen ini mereka hanya fokus menyampaikan visi dan misi mereka. Kuasa dan pengetahuan mereka mulai tampak pada segmen 2, pada segmen ini merupakan pendalaman visi misi, dimulai dari paslon 2 kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 2 terkait dengan strategi paslon 2 untuk mewujudkan Pesisir Selatan swasembada pangan. Inti kutipan paslon 2 mengatakan sebagai berikut.

“... Kami melihat dari data BPS, kontribusi pertanian terhadap PDRB hanya 36,49% dan pengolahan hanya 6,65%. Dari kondisi ini, kami tawarkan agar potensi alam Pesisir Selatan dikelola lebih baik melalui pertanian, perkebunan, perikanan menuju agroindustri, dengan jalan usaha tani, rehabilitasi irigasi, penyediaan bibit dan pupuk, serta pemberdayaan nelayan dan petani....” (Kutipan debat 43:47-45:18).

Berdasarkan kutipan diatas, paslon 2 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menggunakan data BPS dan gambaran kondisi daerah untuk menunjukkan bahwa mereka paham tentang permasalahan ekonomi Pesisir Selatan. Pengetahuan itu kemudian digunakan sebagai kekuatan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka mempunyai solusi nyata terhadap permasalahan tersebut, seperti mengelola potensi alam, memperbaiki irigasi, menyediakan pupuk dan bibit, serta memberdayakan nelayan dan petani. Dengan cara ini, pengetahuan yang mereka sampaikan menjadi sumber kuasa untuk mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Sementara itu, kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 1 adalah mengenai pendidikan, bagaimana mereka menggunakan pengetahuan untuk memperkuat argumen politik mereka di bidang pendidikan. Inti kutipan paslon 1 mengatakan sebagai berikut.

“... Kondisi hari ini lama rata-rata sekolah baru di angka 8,58%, kami dari pemerintah daerah jika diizinkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati, maka beban-beban berat yang selama ini menjadi halangan bagi masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke depannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana APBD yang tersedia seperti itu....” (Kutipan debat 46:59-48:37).

Berdasarkan kutipan diatas, paslon 1 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menunjukkan data rata-rata lama sekolah di Pesisir Selatan yang masih rendah, yaitu hanya 8,58%. Data ini menjadi dasar untuk menggambarkan bahwa persoalan pendidikan sudah berlangsung lama dan perlu diselesaikan. Data tersebut membuktikan bahwa mereka memahami kondisi nyata masyarakat. Setelah itu, mereka menawarkan solusi dengan mengambil alih beban biaya pendidikan melalui dana APBD supaya anak-anak

bisa tetap melanjutkan sekolah. Cara ini membuat pengetahuan yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar informasi, melainkan juga menjadi dasar untuk membangun kuasa politik, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dan komitmen memperbaiki pendidikan. Selanjutnya, segmen 3 kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 1 pada segmen ini terkait dengan strategi paslon memastikan proses dan hasil musrenbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inti kutipan paslon 1 mengatakan sebagai berikut.

“... Pelaksanaan musrenbang harus memastikan apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa dieksekusi secara berjenjang dari nagari, kecamatan hingga kabupaten, tugas kami nanti untuk bisa mengeksekusi dengan jelas semua keinginan masyarakat yang lahir dari musrenbang apabila tanpa ada musrenbang yang berjenjang yang harus kita laksanakan maka semangat dari pada masyarakat kita untuk mengikuti semua perencanaan-perencanaan yang selama ini sudah mereka lakukan tetapi pemerintah tidak mampu untuk melakukannya, maka tingkat kepercayaan terhadap musrenbang itu sendiri akan menjadi hilang...” (Kutipan debat 55:11-57:12).

Berdasarkan kutipan di atas, paslon 1 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menekankan pentingnya musrenbang sebagai sarana untuk menerima aspirasi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa apabila hasil musrenbang tidak dijalankan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dari pengetahuan itu, Paslon 1 membangun kuasa dengan janji mereka untuk benar-benar mengeksekusi hasil musrenbang dan menghentikan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa kepemimpinan mereka akan lebih partisipatif dan berpihak pada masyarakat, karena dari awal pun paslon 1 telah menyampaikan bahwa ia adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 2 terkait musrenbang dapat dilihat dari inti kutipan sebagai berikut.

“...Aspirasi-aspirasi dari masyarakat itulah yang akan kita laksanakan nantinya, tanpa musrenbang tentunya kita tidak ada pedoman untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan ke depan ini, Maka dari pada itu skala prioritas ini akan kita naikkan berjenjang itu sampai di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan musrenbang ini sampai ke tingkat nasional...” (Kutipan debat 57:26-59:13).

Berdasarkan kutipan di atas, paslon 2 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menegaskan bahwa musrenbang adalah pedoman penting pembangunan. Mereka menunjukkan pemahaman bahwa musrenbang menjadi tempat menggali ide dan menentukan prioritas masyarakat. Dari pengetahuan itu, mereka membangun kuasa dengan janji untuk menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar kebijakan. Dengan cara ini, mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa kepemimpinan mereka akan terbuka dan berpihak pada rakyat. Selanjutnya terkait dengan strategi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 2 dapat dilihat pada inti kutipan berikut.

“... Membangun jalan usaha tani, rehabilitasi irigasi, bantuan bibit dan pupuk, akses modal bagi petani dan nelayan, serta mengembangkan agroindustri untuk komoditas unggulan, agar Pesisir Selatan siap menjadi lumbung pangan sesuai dengan RPJPD yang sudah ditetapkan itu makanya kita mengacu kepada disana untuk visi dan misi yang disampaikan pada hari ini tentu Pesisir Selatan bagaimana pangan ini yang menjadi prioritas...” (Kutipan debat 1:03:27-1:05:13).

Berdasarkan kutipan di atas, paslon 2 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami persoalan yang dihadapi petani dan nelayan di Pesisir Selatan. Dari sini terlihat bahwa pengetahuan mereka tentang kondisi daerah dijadikan dasar untuk membangun kuasa, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa mereka punya kemampuan dan strategi jelas untuk menjadikan Pesisir Selatan sebagai lumbung pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu kuasa dan pengetahuan yang dibangun oleh paslon 1 dapat dilihat dari inti kutipan sebagai berikut.

“... Setiap irigasi tidak semuanya kewenangan daerah, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi dan pusat. Dengan APBD yang terbatas, ditambah dukungan partai dan pemerintah pusat, percepatan pembangunan irigasi bisa tercapai, dan ini akan merupakan salah satu jalan percepatan pembangunan Pesisir Selatan ke depan. Kita boleh tertawa tapi nanti kita bisa sama-sama melihat buktinya...” (Kutipan debat 1:06:06-1:07:06).

Berdasarkan kutipan di atas, paslon 1 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menunjukkan bahwa mereka mengetahui tidak semua irigasi bisa dibiayai oleh pemerintah daerah, karena ada yang

menjadi tanggung jawab provinsi maupun pusat. Dari pengetahuan tersebut, mereka meyakinkan masyarakat bahwa jika terpilih, mereka akan mencari solusi lewat pemanfaatan APBD serta dukungan partai dan pemerintah pusat. Dengan cara ini, mereka ingin menegaskan bahwa meski anggaran daerah terbatas, mereka tetap punya strategi dan jaringan politik untuk mempercepat pembangunan irigasi di Pesisir Selatan, Paslon 1 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat serta rekam jejak keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, musrenbang, digitalisasi, dan pengembangan pariwisata maupun agroindustri. Mereka memposisikan diri sebagai pemimpin yang berpengalaman dan siap melanjutkan program yang dianggap berhasil. Sementara itu, paslon 2 membangun kuasa dan pengetahuan dengan menekankan bahwa banyak sektor daerah masih belum berkembang. Mereka menawarkan solusi berbasis potensi lokal, seperti ekonomi, pertanian, musrenbang, agroindustri, dan pariwisata, serta kebutuhan generasi muda. Paslon 2 memposisikan diri sebagai pemimpin yang membawa perubahan dan mendorong kemajuan daerah secara lebih merata.

Pembahasan

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori wacana, pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault. Berdasarkan pandangan Foucault wacana dipengaruhi oleh pengetahuan dan kekuasaan secara bersamaan, kekuasaan akan menentukan pengetahuan apa saja yang dianggap sebagai kebenaran, kenormalan sehingga ia dapat menjadi wacana umum (Foucault, 2017). Wacana bagi Foucault adalah bagaimana orang berbicara dan berbagi ide, sedangkan pengetahuan yaitu bukan sekadar kumpulan informasi, tapi sesuatu yang dibentuk melalui ucapan, pernyataan, atau praktik dalam suatu situasi tertentu (diskursus). Jadi, pengetahuan selalu muncul dalam konteks bagaimana orang berbicara tentang sesuatu (Martono, 2014). Jadi, bagi Foucault pengetahuan bukan sekedar kebenaran tunggal yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang diciptakan melalui percakapan, situasi dan relasi kuasa. Pengetahuan menentukan siapa yang boleh berbicara, apa yang boleh mereka katakan dan seberapa besar otoritas yang mereka miliki (Foucault, 2019). Kemudian kekuasaan menurut Foucault adalah milik siapapun, bukan hanya milik para penguasa yang memiliki otoritas legal-formal. Setiap orang bisa menjadi pihak yang menjalankan kekuasaan dan juga menjadi sasaran dari kekuasaan tersebut (Foucault, 2017). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kaitan antara wacana, pengetahuan, dan kuasa tampak ketika kedua paslon menggunakan bahasa, data, dan pengalaman untuk membangun kebenaran yang mereka anggap tepat. Hal ini menjadikan debat sebagai ruang perebutan legitimasi, sebagaimana digambarkan Foucault. Dalam konteks ini, wacana muncul dari cara masing-masing calon mengangkat isu untuk membentuk persepsi publik. Paslon 1 menonjolkan kesinambungan program, sementara paslon 2 menawarkan perubahan. Pengetahuan terlihat melalui penggunaan data, pengalaman, dan penjelasan yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap persoalan daerah serta solusi yang disiapkan. Dari proses tersebut, kuasa tampak ketika masing-masing pihak berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pandangan merekalah yang layak dipercaya paslon 1 melalui rekam jejak keberhasilan sebelumnya, dan paslon 2 dengan menegaskan bahwa kepemimpinan mereka di masa lalu lebih baik dibanding kondisi saat ini. Pemahaman terhadap teori wacana, pengetahuan dan kekuasaan terkait dengan penelitian ini saling terkait dalam membentuk cara kedua paslon menyampaikan isu, menggunakan data, dan memengaruhi pandangan publik selama debat. Melalui teori ini dapat terlihat bagaimana bahasa, argumen, dan strategi komunikasi yang digunakan paslon bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga cara untuk membangun makna, menunjukkan kapasitas, dan merebut legitimasi politik

Wacana

Keterkaitan hasil penelitian dengan konsep teori wacana Foucault, terlihat dari bagaimana kedua paslon membentuk cara publik memandang persoalan daerah melalui pilihan isu dan narasi yang mereka sampaikan. Paslon 1 membangun wacana tentang pentingnya keberlanjutan program, sehingga masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa kebijakan sebelumnya telah berjalan baik dan perlu diteruskan. Sementara itu, paslon 2 mengembangkan wacana perubahan dengan menonjolkan perbandingan antara masa kepemimpinannya dahulu dan kondisi daerah saat ini. Cara mereka memilih isu, menekankan poin tertentu, serta membingkai persoalan daerah menunjukkan apa yang dikatakan Foucault bahwa wacana bukan sekadar bahasa, tetapi praktik yang membentuk cara orang memahami realitas. Melalui wacana inilah kedua paslon berusaha membentuk sudut pandang publik agar selaras dengan kepentingan politik mereka foucault menyatakan bahwa wacana tidak sekadar bahasa atau ucapan, melainkan praktik sosial yang menentukan apa yang dianggap penting, apa yang diperdebatkan, dan bagaimana masyarakat diarahkan untuk memahami suatu situasi. Dengan demikian, wacana dalam debat ini menjadi alat utama bagi kedua paslon untuk mempengaruhi persepsi publik dan membangun legitimasi awal terhadap narasi politik yang mereka usung (Nurhadi, 2022).

Pengetahuan

Keterkaitan hasil penelitian dengan konsep pengetahuan dalam teori Foucault, dimana data pengalaman, dan argumen yang digunakan kedua paslon untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap masalah daerah dan untuk menegaskan kapasitas masing-masing. Dalam penelitian ini, pengetahuan terlihat dari bagaimana paslon memanfaatkan angka, fakta, capaian program, serta pengalaman kepemimpinan untuk membangun citra bahwa mereka paling memahami kebutuhan masyarakat. Sesuai pandangan Foucault, pengetahuan tidak netral, tetapi dibentuk melalui bahasa dan konteks tertentu sehingga dapat digunakan untuk memproduksi “kebenaran” versi masing-masing calon. Karena itu, pengetahuan yang muncul dalam debat bukan hanya informasi, tetapi strategi untuk memperkuat posisi politik. Pengetahuan yang mereka tampilkan tidak lagi sekadar informasi objektif, tetapi telah menjadi alat politik untuk membentuk “kebenaran” tertentu di depan publik. Sesuai teori Foucault, pengetahuan selalu terkait dengan konteks sosial, bahasa, dan relasi kuasa, sehingga apa yang dinilai benar atau valid sangat dipengaruhi oleh siapa yang mengatakannya dan dalam situasi apa hal itu disampaikan. Karena itu, pengetahuan yang muncul dalam debat tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan persoalan, tetapi juga untuk memperkuat citra bahwa masing-masing paslon adalah pihak yang paling paham dan paling layak dipercaya oleh masyarakat (Lestari 2022).

Kekuasaan

Keterkaitan hasil penelitian dengan konsep pengetahuan dalam teori Foucault di mana, kemampuan kedua paslon memengaruhi cara masyarakat berpikir melalui kebenaran versi mereka masing-masing. Dalam penelitian ini, kekuasaan tampak ketika paslon 1 menggunakan keberhasilan masa lalu sebagai alat meyakinkan publik, sedangkan paslon 2 menegaskan bahwa daerah lebih baik pada masa mereka memimpin. Melalui argumen tersebut, masing-masing paslon berupaya membuat publik menerima narasi mereka sebagai yang paling benar. Sejalan dengan Foucault, kekuasaan tidak hanya berada pada jabatan formal, tetapi bekerja melalui bahasa, pengetahuan, dan strategi retorika yang digunakan untuk membentuk opini publik. Dengan demikian, debat menjadi arena di mana kekuasaan dijalankan melalui proses memengaruhi, mengarahkan, dan mengatur cara masyarakat menilai kandidat. Dari konsep teori Foucault, kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan, tetapi siapa yang mampu mengendalikan percakapan, menentukan apa yang dianggap benar, dan membentuk persepsi sosial. Dalam debat ini, kekuasaan hadir lewat cara kedua paslon mengatur arah diskusi, memengaruhi opini, dan menempatkan diri sebagai sumber otoritatif yang paling dipercaya. Dengan demikian, kekuasaan dalam penelitian ini tidak hanya tampak dalam bentuk klaim politik, tetapi dalam kemampuan membingkai realitas dan mempengaruhi cara masyarakat menilai kebenaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debat Pilkada Pesisir Selatan menjadi ruang di mana wacana, pengetahuan, dan kekuasaan saling bekerja sebagaimana dijelaskan Foucault. Kedua paslon membentuk cara publik melihat persoalan melalui narasi yang mereka susun, menggunakan data dan pengalaman untuk menciptakan kebenaran versi mereka, serta menjalankan kuasa dengan mengarahkan opini masyarakat agar menerima argumen mereka sebagai yang paling tepat. Dengan demikian, debat bukan hanya ajang penyampaian program, tetapi juga arena perebutan makna dan legitimasi politik melalui bahasa dan strategi retorika yang mereka bangun (Suryani, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iskandar (2020) yang menunjukkan bahwa debat publik merupakan arena produksi makna politik di mana kandidat berusaha membangun wacana dan memperkuat citra diri mereka melalui kebijakan yang dibuat. Dalam konteks lokal di Pesisir Selatan, wacana yang muncul lebih menekankan kedekatan emosional dan kesinambungan program sosial yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Pesisir Selatan. Selanjutnya, penelitian ini diperkuat oleh temuan Jamaluddin, et al (2024) yang menunjukkan bahwa debat publik penting untuk memperkuat citra calon dan meningkatkan pemahaman politik pemilih. Akan tetapi, penelitian ini menambahkan bahwa debat publik juga berfungsi sebagai arena perebutan wacana dan kebenaran politik, di mana para calon menggunakan data dan pengalaman untuk meyakinkan publik bahwa pandangan merekalah yang paling benar.

Akan tetapi, penelitian ini berbeda dari hasil temuan peneliti Juditha & Darmawan (2024) yang menunjukkan bahwa percakapan warganet dalam debat Pilpres 2024 cenderung satu arah dan minim interaksi, sementara itu dalam penelitian ini justru menemukan bahwa di Pesisir Selatan, diskusi publik setelah debat berlangsung lebih aktif. Warga menafsirkan ulang isi debat melalui media sosial lokal seperti grup WhatsApp dan YouTube, sehingga debat publik melahirkan ruang partisipasi baru bagi masyarakat. Kemudian penelitian ini sejalan dengan temuan Kamindang (2023) yang meneliti debat Pilkada di kota Palu, yang menunjukkan bahwa debat publik belum sepenuhnya dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Hal sama terjadi pada debat di Pesisir Selatan bahwa debat memang tidak langsung mengubah pilihan politik pemilih, melainkan debat menjadi salah satu metode kampanye yang membantu pemilih untuk melihat gaya kepemimpinan paslon yang mereka pilih. Selain itu, penelitian ini diperkuat oleh temuan Rawis (2019) yang

menyoroti keterbatasan efektivitas debat karena akses masyarakat yang masih rendah. Sementara itu di Pesisir Selatan, meskipun banyak masyarakat yang tidak hadir secara langsung mengikuti jalannya debat, tetapi mereka tetap bisa menyaksikan jalannya debat melalui media sosial dan channel youtube pengenalan visi misi dan program kerja pasangan calon. Dalam konteks Pilkada Pesisir Selatan 2024, debat tidak hanya menjadi ajang penyampaian visi, misi, dan program kerja, tetapi juga arena perebutan wacana dan kekuasaan melalui bahasa, pengetahuan, dan strategi komunikasi yang digunakan para calon. Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang menegaskan pentingnya debat dalam memperkuat citra TVRI Sumatera Barat yang justru membuat debat tetap efektif sebagai sarana penyebaran wacana politik dan kesadaran politik masyarakat, serta menambahkan dimensi baru bahwa debat publik juga merupakan praktik wacana politik di mana para calon membangun legitimasi dan pengaruh melalui cara mereka berbicara, berargumen, dan berinteraksi. Dengan demikian, efektivitas debat publik tidak hanya diukur dari jumlah penonton atau partisipasi masyarakat, tetapi dari kemampuannya membentuk pemahaman, dan hubungan simbolik antara calon pemimpin dan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, debat publik Pilkada Pesisir Selatan menjadi ruang di mana wacana diproduksi melalui relasi kuasa dan pengetahuan. Kedua paslon membangun legitimasi politik dengan menggunakan data, pengalaman, dan narasi keberhasilan untuk membentuk persepsi publik tentang pembangunan daerah. Paslon 1 menekankan capaian program dengan menunjukkan data statistik sebagai dasar kuasa, sementara Paslon 2 menguatkan posisinya melalui pengalaman empiris dan narasi perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan digunakan sebagai alat kuasa untuk memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga debat tidak hanya menjadi wadah penyampaian visi dan misi, tetapi juga ajang pertarungan wacana sebagaimana dijelaskan Foucault. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas debat oleh KPU, pemanfaatan pendekatan Foucault dalam kajian politik lokal, serta peningkatan literasi kritis masyarakat agar mampu menilai paslon bukan hanya dari janji melainkan dari cara mereka menyampaikan wacana di hadapan publik. Penelitian ini memiliki batasan karena hanya menganalisis debat putaran pertama. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya disarankan memperluas fokus penelitian pada debat putaran kedua atau membandingkan debat Pilkada di daerah dan tahun berbeda untuk memahami pola komunikasi politik secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Aefra, C., & Mukti, I. (2025). Analisis Pola Komunikasi Tiap Paslon pada Debat Ke-5 Calon Presiden Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 302–318. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.402>.
- Anwar, R. (2019). Mengkaji Efektivitas Kampanye Politik dalam Perspektif Public Relations. *Ettisal: Journal of Communication*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v4i1.3072>
- Creswell, J. W. (2018). *Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, M., Junita, Taufik, M., & Hutaean, M. (2021). Tim Penyusun Materi Dalam Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 102–108.
- Denzin, N. K & Lincoln, Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Prometheus.
- Foucault, M. (2019). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Hermawan, i. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran.
- Iskandar, F. (2020). Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.177>.
- Jamaluddin, J., Yulia, Y., Yusrizal, Y., Hasbi, Y., & Tasyukur, T. (2024). Penguatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melalui Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2), 381-385.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2024). Analisis Jaringan Komunikasi Warganet pada Debat Publik Calon Presiden-Wakil Presiden Pemilu 2024 di Media Sosial Analysis of Netizen Communication Networks in the Public Debate of Presidential-Vice Presidential Candidates for the 2024 Election on Social , (3), 131–144. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5522>

-
- Kamindang, I., Tabran, M., Ambotuo, H., & Hamid, N. (2023). Efektivitas Debat Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu Tahun 2020 (Studi di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 36–49.
- Kurniawan, A. R. (2025). The Threat of Forming a Post-truth Scenario Through Political Propaganda by Social Media Users in the 2024 General Election. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), 56–64.
- Lestari, R. (2021). Power/Knowledge dalam Komunikasi Politik: Telaah Pemikiran Michel Foucault. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 121–135.
- Mouwn, E. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault : Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Nurhadi, Z. (2022). Kontestasi Wacana pada Debat Politik Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(1), 77–89.
- Purwono, P. (2008). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method), Studi Kepustakaan*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Ramadhan, H. A. (2006). Figur Wakil Rakyat Ideal Dalam Membangun Kedaulatan Rakyat , <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-7c686256adeb089e869c0ef51ae115bf.pdf>.
- Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, S. (2024). Framing, Pengetahuan, dan Relasi Kuasa dalam Debat Publik Calon Kepala Daerah. *Jurnal Komunikasi dan Politik Lokal*, 5(1), 33–52.
- Warjiyati, S. (2014). Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4 (1), 112–135. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.112-135>.